



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SUB UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMIRAN**
2. Jabatan : **KEPALA SATUAN**
3. NHK : **466220**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 390.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 733 m2/64 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 1100 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 760 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 343 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 112.500.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HADIAH Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 552.500.000

III. HUTANG

Rp. 127.801.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

424.699.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.